

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berakhirnya tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, *United Nation* atau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melakukan sidang umum pada tanggal 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Sidang yang dihadiri oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dengan resmi mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Program perencanaan pembangunan itu disusun dalam dokumen "*Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals*". Dokumen ini berisi 17 sasaran dan 169 target pembangunan untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang (Hoelman *et al*, 2015: 8).

Salah satu dari ketujuh belas sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah *no poverty* yaitu tanpa kemiskinan. Sasaran pertama inilah yang penulis ambil untuk diteliti dan diuji. Pasalnya, persoalan kemiskinan adalah persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia ini, apalagi dengan terus meningkatnya jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita

per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk), jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 6.900 orang dari September 2016 ke Maret 2017 (Destrianita, 2017: www.tempo.co).

Sebuah laporan baru menunjukkan, sebagian besar penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di kawasan Asia hidup di Indonesia dan Filipina. Laporan dari “*Asean-China-UNDP Report on Financing the Sustainable Development Goals (SDGs) in ASEAN*” tersebut bertujuan untuk melacak kemajuan pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Laporan tersebut menunjukkan, pada intinya 10 negara ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam urusan pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Meski begitu, dari laporan terbaru menyebutkan sekitar 36 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, 90 persennya berada di Indonesia dan Filipina. Salah satu indikator kemiskinannya adalah mereka yang berpenghasilan rendah, sekitar US\$1,90 atau setara dengan Rp 25 ribu per hari (Budi, 2017: m.liputan6.com).

Selanjutnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 masih mencapai 488.830 ribu jiwa dengan garis kemiskinan 360.169 (berdasarkan data BPS DI Yogyakarta). Hal ini berarti masih ada 488.830 ribu orang miskin di DI Yogyakarta dengan penghasilan di bawah Rp. 360.169 per kapita per bulan. Mengantisipasi kemiskinan yang terjadi, DPRD DI Yogyakarta meminta Pemda DI Yogyakarta untuk

melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengentasan kemiskinan.

Salah satu program pengentasan kemiskinan tersebut adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang nilainya Rp 40 miliar. Namun, pelaksanaan tersebut tidak tepat sasaran. Program tersebut justru hanya dimaknai pembagian uang Rp 1 juta oleh pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota.

Irfan Syauqi Beik menyebutkan bahwa pada tahun 2008 untuk mengantisipasi dampak perekonomian yang antara lain berdampak pada kenaikan harga minyak dan pangan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan, salah satunya adalah paket Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, kebijakan BLT tersebut seringkali tidak efektif akibat koordinasi dan manajemen yang kurang baik. Untuk itu, diperlukan adanya sejumlah instrumen alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat, infak dan sedekah (Beik, 2009: 1).

Dipilihnya lembaga zakat sebagai objek penelitian karena ia dibangun dengan menggunakan modal yang dikumpulkan dari para *muzakki*, yang modalnya merupakan milik orang-orang miskin dan diupayakan semaksimal mungkin untuk memerangi kemiskinan. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia yang kemudian akan memiliki potensi zakat terbesar pula. Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah muslim mencapai 87,18% dari

sekitar 242,5 juta jiwa penduduk Indonesia. Lebih dari 50% atau sekitar kurang lebih 121,25 juta jiwa muslim Indonesia dapat diasumsikan termasuk ke dalam kelas menengah yang dalam konteks ini mereka adalah *muzakki* (BPS, 2010: bps.go.id).

Fakta tersebut diperkuat dengan data penelitian dari Baznas Indonesia pada 2016 potensi zakat mencapai 286 triliun. Dilansir dari Harian Republika, ketua Baznas Bambang Sudibyo, mengatakan “setiap tahunnya pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Pada 2010, zakat yang diperoleh sekitar 217 triliun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka 286 triliun”. Selanjutnya, beliau menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga syariah terbesar, ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga luar biasa besarnya (Intan, 2017: Harian Republika).

Jika melihat perkembangan pembangunan ZIS di Indonesia, maka sejak dekade 1990 telah berdiri berbagai macam lembaga pengelola zakat yang berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya (Beik, 2009: 2). Di antara lembaga ZIS, BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri akan lebih relevan dengan SDGs karena langsung di

bawah naungan pemerintah. Oleh sebab itu, penulis mengambil BAZNAS sebagai objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran zakat produktif terhadap pencapaian SDGs dalam pengentasan kemiskinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan suatu penelitian untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat produktif terhadap pencapaian SDGs dalam pengentasan kemiskinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian terkait peran zakat produktif ini dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis dan juga bagi pembaca dalam mengetahui peran dan pendayagunaan dana zakat. Kegunaan lain dari penelitian ini adalah dapat membantu peneliti selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan zakat produktif.

2. Praktis

Mengingat betapa pentingnya capaian keberhasilan suatu lembaga dalam pelaksanaan programnya, maka penelitian ini

diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan suatu lembaga filantropi dalam pelaksanaan programnya. Dalam penyajian dan hasil penelitian yang akan penulis lakukan nanti, diharapkan Baznas dapat mempertimbangkan dan melihat dengan capaian sekian persen atas pendayagunaan zakat produktifnya terhadap pengentasan kemiskinan, pendayagunaan seperti itu apakah harus tetap dipertahankan atau dirubah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diuraikan menjadi lima bab dengan uraian garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini berisi pembahasan terkait penelitian-penelitian terdahulu tentang peran zakat produktif, *SDGs (sustainable development goals)* serta kemiskinan dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sampel dan lokasi penelitian, teknik pengambilan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, teknik keabsahan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil analisis wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisa serta saran untuk peneliti selanjutnya.